
OPTIMALISASI EKONOMI KELEMBAGAAN DALAM PERAN MENGURANGI MASALAH KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA**Desy Natalia¹, Anugrah Fakhry Muhammad²**Universitas Sebelas Maret¹²E-mail : desynatalia@student.uns.ac.id**ABSTRACT**

Institutional economics is a reaction to previous economic trends which received criticism, which was criticized for developed and developing countries. The role of institutional economics has an important role in overcoming problems that exist within a country, one of which is the problem of economic inequality. Institutional economics is present to address the problem of economic inequality in bringing direction to realizing social welfare. The method used in this writing is a qualitative method by analyzing literature reviews from various journal sources or other articles. The purpose of this writing is to determine the optimization of institutional economics as a role in reducing the problem of economic inequality in Indonesia.

Keywords: Role of Institutional Economics, Economic Inequality, Welfare

ABSTRAK

Ekonomi kelembagaan menjadi reaksi dari aliran ekonomi sebelumnya yang mendapatkan kritikan dimana kritikan tersebut untuk negara maju dan berkembang. Peran ekonomi kelembagaan memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam sebuah Negara, salah satunya masalah ketimpangan ekonomi. Ekonomi kelembagaan hadir untuk masalah ketimpangan ekonomi dalam membawa arah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan mengalisis literature review dari berbagai sumber jurnal atau artikel lainnya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui optimalisasi ekonomi kelembagaan sebagai peran mengurangi masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Ekonomi Kelembagaan, Ketimpangan Ekonomi, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih mempunyai persoalan ekonomi mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi negara-negara berkembang di dunia, yaitu persoalan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. Sementara itu, pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki tujuan utama meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2003). Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan merata perlu diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang menyeluruh pula. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas harus memaksimalkan usaha sebisa mungkin untuk menekan ketimpangan di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemerataan pembangunan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang seluas- luasnya. Pemerataan pembangunan akan mengurangi ketimpangan antardaerah dan tidak ada muncul pembagian daerah atau wilayah yang maju maupun wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Menurut (Myrdal, 1975), penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan adalah akibat dari adanya *spread effect* dan *backwash effect* sebagai dampak dari penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Perbedaan yang terjadi kemudian menimbulkan proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda dan memunculkan sebuah *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Terjadinya *gap* atau jurang tersebut



nantinya memicu ketimpangan pendapatan dan memperbesar kemiskinan antardaerah atau wilayah. Berdasarkan data BPS yang tercatat pada akhir tahun lalu, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 0,398 dan rasio gini di daerah pedesaan sebesar 0,314. Jika ukuran ketimpangan dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00 persen yang berarti tergolong kategori ketimpangan sedang dan daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 20,83 persen yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Permasalahan ketimpangan, utamanya kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan, cenderung erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.

Gambar 1.1. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021

[Sumber: BPS, 2022]



Gambar 1.2. Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau September 2021

[Sumber: BPS, 2022]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di atas, bisa dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia angkanya berfluktuatif dari tahun ke tahunnya. Selain itu, jumlah penduduk miskin di tiap pulau menunjukkan bahwa pedesaan memiliki lebih banyak warga yang berada dalam kategori miskin. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan belum sepenuhnya merata karena sebagian besar pembangunan berpusat di kota. Akibatnya, penduduk desa yang daerah jangkauannya lebih jauh dari pusat pembangunan masih luput dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Ukuran ketimpangan di perkotaan yang lebih besar pun juga mengimplikasikan bahwa di perkotaan itu sendiri, meskipun jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit, tetapi terdapat jurang yang lebih tajam di antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Maka dari itu, masalah ketimpangan ini membutuhkan kontribusi yang bersinergi dan menyeluruh dari berbagai aspek ekonomi, termasuk peran kelembagaan dalam perekonomian. Ekonomi kelembagaan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tatanan makro maupun mikro. Selama perkembangannya, ada dua jenis ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru.

Menurut (Rutherford, 1994), ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad 20 dengan tokoh-tokohnya Veblen, Commons, Mitchell, dan Clarence Ayres. (Nabli & Nugent,

1989) menjelaskan bahwa dengan pandangan ekonomi kelembagaan lama, para tokoh mengkritik aliran neoklasik karena beberapa alasan, di antaranya:

1. Neoklasik mengabaikan institusi serta relevansi dan arti penting dari kendala-kendala non-anggaran (*non-budgetary constraints*);
2. Penekanan berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational-maximizing self-seeking behavior of individuals*);
3. Konsentrasi berlebihan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) serta bersifat statis;
4. Penolakan preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan.

Sementara itu, ekonomi kelembagaan baru yang muncul setelahnya menawarkan versi yang lebih disempurnakan. Ekonomi kelembagaan baru dibangun berdasarkan landasan ekonomi neoklasik, tetapi mampu menjawab dan mengungkapkan permasalahan yang tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik, yaitu eksistensi perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Ekonomi kelembagaan baru memposisikan dirinya sebagai pembangun teori kelembagaan non- pasar dan telah mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi, seperti hak kepemilikan, hukum kontrak, dll. Sebagai satu jalan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Adanya informasi yang tidak sempurna, eksternalitas dan fenomena *free-riders* dalam barang-barang publik dinilai sebagai sumber utama kegagalan pasar, sehingga kehadiran institusi non- pasar mutlak diperlukan. Ketika studi-studi pembangunan memerlukan suatu landasan teoritis, maka ekonomi kelembagaan baru dapat dijadikan solusinya.

Berdasarkan (North, 1990 & Williamson, 1985), kata “kelembagaan” seringkali didefinisikan sebagai kata “organisasi”. Namun, dalam pendekatan ekonomi kelembagaan baru, kelembagaan memiliki definisi sebagai aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Kelembagaan ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan, ketidakadilan, dan inefisiensi biasanya muncul bukan karena absennya kebijakan, tetapi lebih pada tidak akomodatifnya kebijakan terhadap kerangka regulasi dan struktur intensif pemerintah yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan kelembagaan yang dapat memfasilitasi dengan baik agar standar ekonomi yang diterapkan dapat bermanfaat (Burky & Perry, 1998). Menurut (Jaya, 2021), teori ekonomi kelembagaan baru sangat cocok untuk dipakai sebagai dasar kajian kebijakan publik seperti perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia karena sifatnya yang holistik, menggabungkan pasar dan non- pasar, formal dan

informal, serta lebih sesuai dengan fenomena keberagaman ekonomi, budaya, sosial, dan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah bagaimana ekonomi kelembagaan dapat mengoptimalkan perannya dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di negara ini.

LITERATUR REVIEW

A. Ketimpangan Ekonomi Antardaerah

Douglas C. North mengemukakan tentang sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang kemudian disebut sebagai hipotesa neoklasik. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang dan terjadi sebaliknya pada negara yang maju. (Myrdal, 1975) juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya, digunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjarangan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* artinya suatu penjarangan dari pusat pertumbuhan yang mendapat keuntungan mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan di daerah sekitar, sementara *backwash effect* merupakan pengaruh yang mengalami kerugian mencakup aliran dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk mengimbangi perkembangan wilayah inti. Besar ketimpangan antarwilayah tersebut dapat diukur menggunakan indeks gini, yaitu membandingkan bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva lorenz, angka yang didapatkan kemudian disebut sebagai rasio gini. Indeks gini berkisar 0 dan 1. Jika gini semakin dekat dengan angka 0, artinya menunjukkan pemerataan yang makin sempurna, sedangkan gini yang mendekati 1 berarti sebaliknya, semakin besar ketimpangan yang terjadi.

B. Ekonomi Kelembagaan Baru

(Jaya, 2021) menjelaskan bahwa ekonomi kelembagaan baru atau *new institutional economics* merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah dampak dari kelembagaan, yaitu peraturan dan cara penegakannya, terhadap perilaku individu yang rasional dalam lingkungan yang ada ketidakpastian dan biaya transaksi di dalamnya, serta menelaah konsekuensi dari perilaku ini terhadap kesejahteraan individu maupun kelompok. Konsep dasar dari teori ekonomi kelembagaan baru, antara lain:

1. Biaya transaksi dan komponennya (*transaction cost*) berasal dari adanya informasi

- yang asimetris serta biaya administratif yang digunakan untuk meminimalisasi ketidaksimetrisan informasi tersebut;
2. Masalah kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*) mengenai cara menyusun kontrak ketika terdapat variabel yang tidak diketahui;
 3. Masalah *principal-agent* mengenai kondisi ketika *principal* tidak mampu melakukan kontrol langsung terhadap aktivitas *agent*, tetapi bisa memberikan pengaruh agar *agent* menjalankan tugasnya dengan baik;
 4. Masalah *adverse selection* yang terkait dengan penciptaan pasar ketika produk yang beredar atau pelaku pasar yang terlibat kualitasnya dipertanyakan;
 5. Masalah *collective action* mengenai cara *agent* yang rasional melakukan *undersupply* terhadap sumber daya dan kapasitas yang dimiliki untuk memecahkan masalah kolektif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan tulisan ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa data deskriptif dalam teks-teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif yang memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai data tentang permasalahan yang dikaji. Untuk itu, digunakan jenis penelitian studi kepustakaan untuk mengumpulkan data- data yang dibutuhkan. (Nazir, 2009) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik yang mengumpulkan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur dan data literatur, catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah. Selain itu, studi kepustakaan juga merupakan langkah yang penting, di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan menghimpun sebanyak- banyaknya data dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik tersebut, dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber bacaan yang lain yang sesuai. Jika telah mendapatkan kepustakaan yang relevan, maka dianalisis dan disusunlah data-data tersebut untuk menghasilkan suatu hasil penelitian.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literatur, bahan yang koheren dengan objek-objek pembahasan yang dibahas. Data yang sudah dikumpulkan diolah dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan serta keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain, kemudian

menyusun data tersebut menjadi satu kesatuan yang terorganisasi. Selanjutnya, dilakukan juga analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari topik permasalahan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Ekonomi Kelembagaan di Indonesia

Ekonomi kelembagaan memiliki peran penting dalam menentukan arah kegiatan ekonomi masyarakat adalah negara. Arah perkembangan ekonomi ditentukan oleh kebijakan dan program yang telah dirancang oleh sebuah negara melalui berbagai instrumen kelembagaan. Ahli ekonomi memang diperlukan dalam menerapkan struktur kelembagaan yang ada, serta membentuk nilai maupun norma yang akan berkembang di kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi kelembagaan juga diperlukan penerapan multidisiplin yang meliputi aspek sosial, hukum politik, budaya sebagai satu kesatuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang menjadi tugas dari ekonomi kelembagaan. Negara dalam menerapkan ekonomi kelembagaan tentunya mengeluarkan kebijakan untuk mengatur aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kelembagaan diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kelembagaan ekonomi tentunya yang menerapkan tidak hanya pemerintah, namun kelompok - kelompok masyarakat yang dibentuk dari nilai maupun norma untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembentukan suatu kelembagaan yang muncul dari masyarakat perlu diperhatikan supaya tidak terjadi permasalahan yang besar. Masalah yang ada dicegah dan diselesaikan dengan dengan kebijakan instrument yang ada. Terkadang aliran ekonomi kelembagaan sangat beragam dengan sejumlah ahli yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda pula mengakibatkan terkadang ekonomi kelembagaan terbagi menjadi beberapa aliran, dari hal itu tidak membuktikan satu aliran lebih baik dari aliran lainnya. Dengan begitu keberadaan ekonomi kelembagaan ini diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan kepercayaan dan ketepatan serta kemanfaatan pemakaian salah satu aliran ekonomi kelembagaan yang akan memberi dampak terhadap berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, perubahan perkembangan industry, kebudayaan, serta salah satunya masalah ketimpangan ekonomi.

2. Peran Ekonomi Kelembagaan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Semua lembaga mendorong aktivitas ekonomi secara inklusif, memang masih kurang karena keberadaan ekonomi kelembagaan terkadang hanya menguntungkan komunitas sendiri saja. Hal itulah keberadaan ekonomi kelembagaan diciptakan salah satunya untuk permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia, misalnya ketimpangan terkait pendapatan, ketimpangan terkait pendidikan, ketimpangan terkait kemiskinan, ketimpangan terkait kesempatan kerja, dan sebagainya. Ketimpangan yang ada dimasyarakat memang tidak bisa dikontrol penyebab terjadinya, namun peran ekonomi kelembagaan menciptakan instrument untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan tersebut. Peran kelembagaan dalam ekonomi sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi kelembagaan didukung dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dalam pasar yang terbuka dan terintegrasi supaya peran ekonomi kelembagaan mendorong perekonomian semakin besar.

3. Dampak Keberadaan Ekonomi Kelembagaan untuk Ketimpangan Ekonomi

Keberadaan Ekonomi kelembagaan tentunya membawa dampak positif maupun negative. Beberapa dampak positif, antara lain (1) aliran ekonomi kelembagaan ini untuk menentukan bentuk struktur kelembagaan dalam membantu masalah ketimpangan ekonomi, (2) aliran ekonomi kelembagaan meningkatkan bekerjanya suatu system perekonomian yang membawa kesejahteraan masyarakat, (3) aliran ekonomi kelembagaan akan membentuk transaksi – transaksi yang timbul dalam aktivitas ekonomi masyarakat untuk mengurangi masalah ketimpangan ekonomi, (4) aliran ekonomi kelembagaan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan permasalahannya. Disisi lain ekonomi kelembagaan juga memberi dampak negatif ketika kesalahan dalam menjalankan rekomendasi dan teori dari para ahli, selain itu juga karena banyaknya asumsi yang tidak realistis untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan aliran ekonomi kelembagaan sebagai reaksi dari aliran ekonomi sebelumnya, kritikan itu tidak hanya untuk Negara maju, namun Negara berkembang pula untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Peran ekonomi kelembagaan diperlukan untuk menyoroti permasalahan yang muncul dalam aktivitas masyarakat, salah satunya masalah ketimpangan ekonomi yang menjadi permasalahan dasar di Negara berkembang.

Ekonomi kelembagaan berarti sebuah Negara dimana pengimplementasiannya untuk menentukan arah perkembangan ekonomi dengan kebijakan dan program yang disesuaikan dengan ketepatan permasalahan yang ada. Keberadaan ekonomi kelembagaan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang terbukti dengan beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat, namun ketika aliran ekonomi kelembagaan tidak diterapkan sesuai ketepatan akan menimbulkan dampak negative yang membawa permasalahan baru. Dengan demikian, ekonomi kelembagaan menekankan suatu ketepatan supaya masalah dapat ditasi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elwan, La Ode Muhammad, Irfan Ido, La Ode Alwi, Hendrik Wanda Putra. 2018. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Publicuho.
- Harahap, Agus Salim. 2010. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Lex Jurnalica Volume 7 no.3.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bisnispembangunan/article/download/1312/1131>
- Rendtorff, Jacob D. 2019. Sustainable Development Goals and progressive business models for economic transformation. Local Economy vol 34.
- Jouanka, Shenny Des, Gisella Kessik, Santoso Tri Raharjo, Nurliana C. Apsari, Maulana Irfan. 2020. Partisipasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di Kalimantan. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Marnelly, T.Romi. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis. Vol.2 No.2
- Marinina, O. 2019. Analysis of trends and performance of CSR mining companies. 4th International Scientific Conference “Arctic: History and Modernity”
- Mosca, Fabrizio, Chiara Civera. 2017. The Evolution of CSR: An Integrated Approach. Shymponya Emerging Issues in Management.
- Narula, Sapna A., Muneer A. Magray, Anupriya Desore. 2017. A sustainable livelihood framework to implement CSR project in coal mining sector. Journal of Sustainable Mining 16
- Pereira, Vijay, James Tuffour, Swetketu Patnaik, Yama Temouri, Ashish Malik, Sanjay Kumar Singh. 2021. The quest for CSR: Mapping responsible and irresponsible practices in an intra-organizational context in Ghana’s gold mining industry. Journal of Business Research 135.
- Perez, Sergio, Samuel Fernández-Salineró and Gabriela Topa. 2018. Sustainability in Organizations: Perceptions of Corporate Social Responsibility and Spanish Employees’ Attitudes and Behaviors. Sustainability
- Thanaya, Sayu Aryantini, AAGP Widanaputra. 2019. The Effect of CSR Disclosure On Firm Risk In Mining Companies Listed On IDX. E-Journal Akuntansi Vol 29 No.2.
- Tumbio, Refli Sinus; Irwansyah dan Taharuddin. 2022. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Maritim Barito Perkasa Banjarmasin. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bisnispembangunan/article/download/1312/1131>.

Wiguna, Juang. 2014. Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT.Admira Baratama Nusantara di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Ilmu Pemerintahan.

UU no. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

UU no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas